

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu kondisi di mana terjadi peningkatan secara berkelanjutan terhadap kegiatan perekonomian suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Peningkatan ini dapat dilihat melalui kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) riil, yaitu nilai keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara setelah dikurangi faktor investasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi dan pendapatan nasional dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya menunjukkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi diukur dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku.

PDB merupakan indikator utama untuk mengukur kinerja ekonomi suatu negara. PDB mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah negara selama periode tertentu, biasanya setahun. PDB membantu menilai pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan produktivitas nasional, serta menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi ekonomi dan untuk perbandingan antar negara dalam konteks ekonomi global (Sujianto et al., 2024). PDB yang tinggi umumnya menunjukkan aktivitas ekonomi yang kuat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Investasi berperan dalam meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas kegiatan usaha, sedangkan pendapatan pajak menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan dan penyediaan infrastruktur.

Sebaliknya, PDB yang rendah dapat mencerminkan lemahnya tingkat investasi dan terbatasnya penerimaan pajak, sehingga pemerintah memiliki keterbatasan dalam mendorong pembangunan, memperluas aktivitas ekonomi, dan meningkatkan produktivitas nasional.

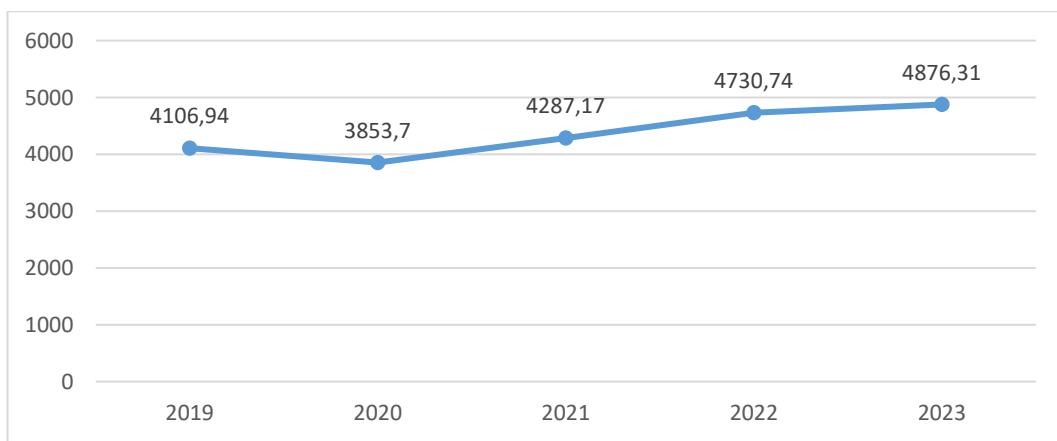
PDB terbagi atas 2, yaitu Atas Dasar Harga berlaku (ADHB), dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDB Atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Sementara itu, PDB Atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan total nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga dari tahun tertentu yang ditetapkan sebagai tahun dasar (BPS Indonesia, 2023).

Menurut Mankiw (2007), PDB per kapita ialah alat untuk mengukur rata-rata nilai ekonomi yang dihasilkan per orang di suatu negara dalam periode waktu tertentu. PDB per kapita dihitung dengan membagi total nilai barang dan jasa yang diproduksi (PDB) dengan jumlah penduduk. Jika PDB per kapita mengalami kenaikan maka dapat dikatakan perekonomian negara tersebut dalam kondisi baik. PDB per kapita, yang dihitung dengan membagi PDB dengan jumlah penduduk, memberikan gambaran umum tentang tingkat kemakmuran suatu negara. Selain itu, PDB dan PDB per kapita dapat digunakan untuk menilai kesejahteraan sosial masyarakat, dan produktivitas suatu negara dapat disimpulkan dari data PDB per kapita (Rahardja, 2008).

Indonesia telah kembali menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Pertumbuhan ekonomi yang kuat sebesar 5,3% pada tahun 2022 mendorong

kenaikan PDB per kapita sehingga Indonesia berhasil masuk kembali ke dalam kategori ini. Pada tahun 2022, pendapatan per kapita Indonesia tercatat sebesar US\$ 4.730,74, jumlah itu masuk ke dalam kategori negara dengan pendapatan menengah ke atas *upper middle income*, yang berkisar antara US\$ 4.256 hingga US\$ 13.025.

Indonesia mencapai status pendapatan menengah atas sejak tahun 2019, namun pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan ke kategori menengah bawah selama dua tahun. Untungnya Indonesia kemudian berhasil bangkit kembali. Sebelumnya, dari tahun 2012 hingga 2018, PDB per kapita Indonesia berada di kisaran US\$ 3.000-3.860, yang termasuk dalam kategori pendapatan menengah ke bawah. Pada tahun 2019, PDB per kapita naik menjadi US\$ 4.106, melampaui ambang batas US\$ 4.045, sehingga Indonesia masuk ke kategori *upper middle income*. Setelah sempat menurun, Indonesia kembali meraih status negara berpenghasilan menengah ke atas pada tahun 2022 (Kemenkeu, 2023). Dalam lima tahun PDB per kapita Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber : World Bank, 2024

Gambar 1. 1 Produk Domestik Bruto (PDB) Per Kapita di Indonesia 2019-2023 (US\$)

Berdasarkan gambar 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa PDB per kapita di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 2019 sampai dengan 2023 terus meningkat. Pada tahun 2020 PDB per kapita sebesar US\$ 3.853 akibat dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan Indonesia turun ke kategori negara berpenghasilan menengah ke bawah, juga berdampak pada kontraksi ekonomi, penurunan pendapatan perkapita dan pelemahan nilai tukar rupiah (BKF Kemenkeu, 2021). Pada tahun 2021–2023, PDB per kapita kembali mengalami peningkatan secara bertahap, yaitu menjadi US\$ 4.287,17 pada 2021, US\$ 4.730,74 pada 2022, dan mencapai US\$ 4.876,31 pada 2023. Pola ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan kinerja ekonomi Indonesia setelah mengalami tekanan pada tahun 2020.

Salah satu faktor penting yang dapat mendorong kemajuan ekonomi adalah adanya kegiatan investasi. Investasi sendiri merupakan aktivitas penanaman dana pada suatu aset dalam jangka waktu tertentu, dengan harapan dapat menghasilkan keuntungan atau meningkatkan nilai aset tersebut. Dampak yang ditimbulkan oleh investasi sangat bergantung pada kebijakan makro ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara (Muryanto *et al.*, 2022).

Investasi adalah penanaman modal dalam sebuah perusahaan dengan tujuan menambah aset dan perlengkapan produksi, sehingga dapat meningkatkan jumlah produksi. Sumber investasi ini dapat berasal dari dua jenis, yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Peningkatan investasi dari tahun ke tahun akan berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja, karena semakin

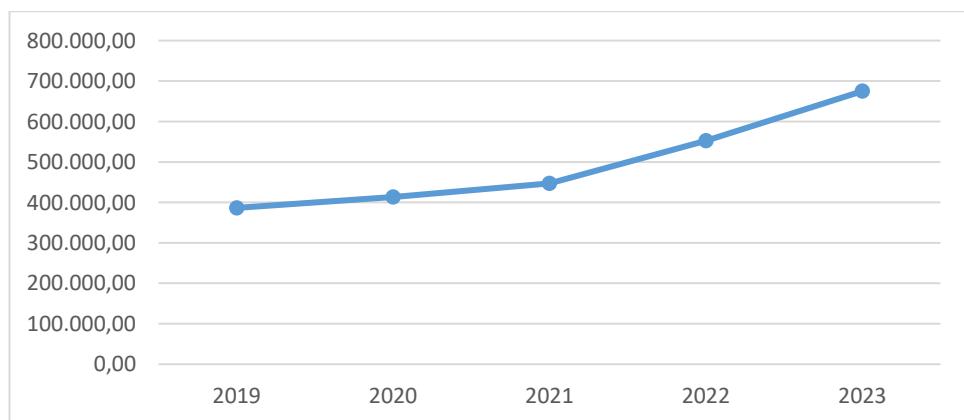
tinggi tingkat investasi, semakin banyak juga tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi.

Berdasarkan teori ekonomi investasi mengacu pada pembelian atau produksi barang modal yang tidak dikonsumsi langsung, tetapi digunakan untuk kegiatan produksi dimasa depan seperti pembangunan infrastruktur atau pabrik. Pendapatan dapat mendorong pertumbuhan investasi yang lebih besar, karena dengan tingginya pendapatan permintaan terhadap barang modal juga meningkat, sebaliknya jika tingkat bunga yang lebih tinggi dapat mengurangi minat investasi, karena meminjam uang menjadi lebih mahal. Walaupun demikian, perusahaan yang memilih menggunakan dana sendiri untuk investasi harus mempertimbangkan biaya kesempatan dari investasi tersebut, dimana tingkat bunga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan antara menggunakan dana untuk investasi atau menabung untuk mendapatkan bunga.

Investasi dalam negeri atau juga dikenal dengan nama penanaman modal dalam negeri (PMDN) diyakini dapat mendorong perekonomian negara berkembang dengan sangat baik. Ketika Tingkat investasi dalam negeri meningkat, hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, PMDN juga dapat memperkuat stabilitas ekonomi domestik, mengurangi ketergantung pada investasi asing, serta meningkatkan kapasitas ekonomi negara untuk menghadapi tantangan global. Dalam hal ini, para penanam modal domestik menggunakan dana dan sumber daya yang bersumber dari dalam negeri, baik dalam bentuk uang tunai, aset, tenaga kerja, maupun sumber daya lainnya yang di manfaatkan untuk membiayai atau mengelola usaha di Indonesia. Sebagai contoh

PMDN dapat berkontribusi dalam pengembangan sektor-sektor strategis seperti industri manufaktur, pertanian, infrastruktur, teknologi informasi dan sektor jasa. Proses PMDN di Indonesia diatur secara rinci dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 tentang penanaman modal, yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan transparan bagi semua pihak yang terlibat. Namun, meskipun penanaman modal dalam negeri memiliki potensi besar untuk memacu pertumbuhan ekonomi, PMDN ini juga menghadapi beberapa hambatan seperti ketidakpastian dalam kebijakan pemerintah, serta kurangnya infrastruktur di beberapa daerah menjadi tantangan yang harus diatasi agar PMDN dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, selain dari peraturan yang jelas dan insentif yang diberikan, pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyederhanakan sistem perizinan usaha untuk memberikan kemudahan bagi para penanam modal domestik (Jufrida *et al.*, 2017).

Berikut merupakan data realisasi investasi penanaman modal dalam negeri:



Sumber : Data BPS 2023

Gambar 1. 2 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (Miliar Rupiah)

Berdasarkan gambar 1.2 diatas, menunjukkan bahwa realisasi investasi penanaman modal dalam negeri di Indonesia telah meningkat secara signifikan dari

tahun 2019 hingga 2023. Realisasi PMDN menunjukkan pola yang cenderung naik dari tahun ke tahun. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji pengaruh investasi PMDN terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita. Pada tahun 2019, nilai investasi tercatat sebesar Rp 386.498,40 miliar, kemudian meningkat menjadi Rp 413.535,50 miliar pada tahun 2020 meskipun pada periode tersebut kondisi ekonomi global terdampak pandemi COVID-19. Selanjutnya, pada tahun 2021 nilai investasi kembali mengalami kenaikan menjadi Rp 447.063,60 miliar, yang menunjukkan tanda pemulihan ekonomi nasional. Kenaikan investasi semakin signifikan pada tahun 2022 dengan total Rp 552.769 miliar, dan mencapai angka tertinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 674.923,40 miliar. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa realisasi penanaman modal dalam negeri di Indonesia mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor domestik dan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong investasi..

Dalam meningkatkan produk domestik bruto (PDB) per kapita suatu negara, selain faktor investasi pendapatan pajak juga merupakan salah satu pilar utama yang menopang stabilitas fiskal. Tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, pajak turut berperan strategis dalam restribusi pendapatan dan stimulasi pembangunan yang berkelanjutan. hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap perekonomian bersifat multidimensional baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pendapatan pajak merupakan seluruh penerimaan yang diperoleh oleh negara dari berbagai sumber pajak, yang terdiri dari pajak yang dikenalkan dalam

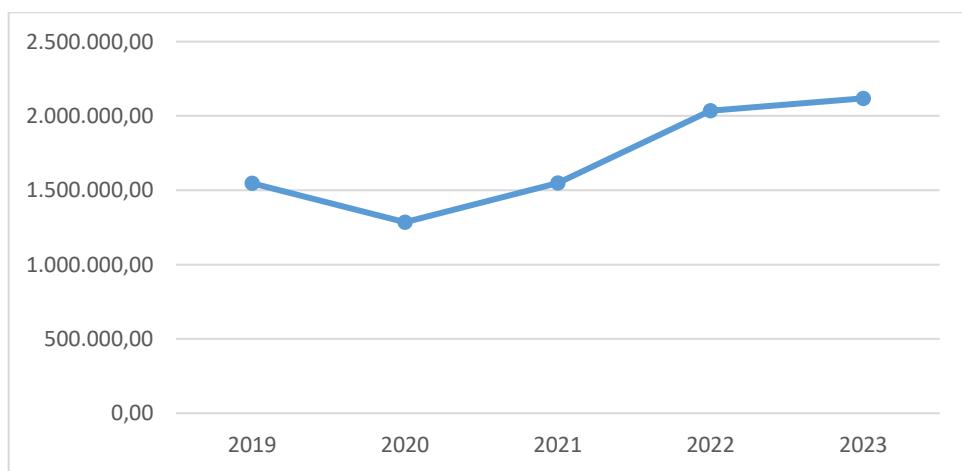
negeri seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya yang berlaku diwilayah nasional. Pendapatan pajak juga dapat diartikan sebagai seluruh pemasukan yang diterima oleh pemerintah yang berasal dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh masyarakat (Saragih, 2018a).

Sebagian besar penerimaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah, masih bergantung pada sektor perpajakan. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari sektor ini, termasuk melalui reformasi perpajakan di tingkat daerah. Di Indonesia, reformasi perpajakan daerah telah berlangsung selama kurang lebih dua dekade dan terbagi menjadi tiga fase. Fase pertama dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Kemudian pada fase kedua, Undang-Undang tersebut direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Selanjutnya, fase ketiga ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan restribusi daerah. Tujuan dari reformasi perpajakan tersebut adalah untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor perpajakan yang pada akhirnya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah (Arfah, 2018).

Keberhasilan reformasi perpajakan dapat dilihat dari peningkatan pendapatan pajak yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Gebreegziabher (2018) dalam Saragih (2018) mengungkapkan bahwa penerimaan pajak memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Mdanat *et al* (2018) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pajak tidak selalu sejalan dengan peningkatan

pertumbuhan ekonomi. Pendapatan pajak dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau negara jika dialokasikan untuk mendanai kegiatan atau proyek yang produktif. Sebaliknya, apabila dana pajak digunakan untuk pengeluaran yang tidak produktif, hal ini justru dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi (Yurianto & Akhmad, 2021).

Berikut merupakan data realisasi pendapatan pajak di Indonesia :



Sumber : Data BPS 2023

Gambar 1. 3 Realisasi Pendapatan Pajak di Indonesia (Miliar Rupiah)

Pada gambar 1.3 diatas menunjukkan bahwa Realisasi Pendapatan Pajak di Indonesia dari tahun 2019–2023 mengalami tren naik secara keseluruhan, tetapi dengan fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan pajak tercatat sebesar Rp 1.546.141,90 miliar. Namun pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi Rp 1.285.136,32 miliar, yang merupakan titik terendah dalam periode lima tahun tersebut. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan pendapatan masyarakat dan perusahaan, serta kebijakan relaksasi pajak dari pemerintah. Selanjutnya, pada tahun 2021 penerimaan pajak kembali meningkat

menjadi Rp 1.547.841,10 miliar. Kenaikan ini menunjukkan adanya pemulihan ekonomi nasional setelah pandemi serta mulai berakhirnya beberapa kebijakan insentif pajak. Pada tahun 2022, realisasi pendapatan pajak meningkat signifikan menjadi Rp 2.034.552,50 miliar. Tren peningkatan berlanjut pada tahun 2023 dengan pencapaian sebesar Rp 2.118.348,00 miliar, angka tertinggi selama periode pengamatan. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak di Indonesia berhasil pulih dan tumbuh secara signifikan setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2020.

Dalam konteks penelitian ini, data ini menunjukkan bahwa penurunan penerimaan pajak berpotensi menghambat investasi pemerintah dalam sektor produksi, yang pada akhirnya dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi. Selain itu, rendahnya penerimaan pajak juga dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi suatu negara, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi aliran investasi masuk. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak guna memastikan pendapatan negara tetap stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menarik lebih banyak investasi.

Dalam konteks produk domestik bruto (PDB) per kapita di Indonesia, baik investasi maupun pendapatan pajak memainkan peran yang sangat terkait. Peningkatan investasi dapat memperbesar kapasitas produksi dan menciptakan lapangan pekerjaan, sementara pendapatan yang lebih tinggi, sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat, dapat memperkuat pendanaan untuk peningkatan infrastruktur dan kebijakan ekonomi yang mendukung. Sehingga

keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita di Indonesia (Ain', 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas penelitian ini :

1. Apakah Investasi berpengaruh terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek ?
2. Apakah pendapatan pajak berpengaruh terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi produk domestik bruto (PDB) per kapita di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) per kapita di Indonesia dalam jangka panjang dan jangka pendek.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis yang diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi pembangunan, tentang pengaruh Investasi, Pendapatan Pajak dan PDB per kapita di Indonesia.
2. Penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait dengan Investasi, Pendapata Pajak dan PDB per kapita.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan peningkatan PDB per kapita.
2. Bagi pengusaha dan masyarakat, sebagai tambahan pengetahuan dan bahan pertimbangan dalam melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang berhubungan dengan Investasi, Pendapatan Pajak dan PDB per kapita.